

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dalam beberapa periode, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Kegiatan perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasa yang diproduksi suatu negara mengalami peningkatan. Dalam dunia nyata, sangat sulit mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda.

Untuk mengukur tingkat produksi nasional yang dihasilkan suatu negara, maka angka yang digunakan untuk menaksir perubahan *output* adalah dengan menghitung nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga (inflasi) telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total *output* barang dan jasa, perubahan PDRB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Kegagalan pasar mendorong pemerintah untuk masuk lebih jauh ke dalam pasar dan melakukan intervensi. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan menjamin keadilan dalam berusaha sehingga perekonomian tidak digerogoti oleh kegagalan pasar. (Mardiasmo, 2002:198). Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi warganya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunya kesejahteraan ekonomi. Di sisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonomi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonomi memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan

kemandirian daerah otonomi. Hal ini diharapkan setiap daerah otonomi mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Belanja Daerah untuk menambah aset tetap daerah.

Era otonomi ini berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang bersifat *desentralisasi bottom up (participative) planning dan budgeting*, dan akuntansi basis kas modifikasi (*modified cash basis*).

Belanja pemerintah telah lama menjadi salah satu opsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Keynes bawah pemerintah sebaiknya bertindak aktif dalam mengelola perekonomian negaranya, idealnya pemerintah membuat kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical*. Saat terjadi *booming* pemerintah harus mengerem pertumbuhan yang berlebihan sebelum terjadi *bubbling* perekonomian, sedangkan pada saat resesi pemerintah harus memberikan stimulus untuk perekonomian yang mana salah satu instrumennya adalah melalui belanja pemerintah. Teori tersebut telah tervalidasi penerapannya di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk menyelamatkan negaranya dari *The Great Depression (1929-1939)* Pada periode tersebut, pemerintah meningkatkan anggaran belanjanya secara drastis.

Belanja Pemerintah Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perekonomian secara agregat. Hal ini disebabkan setiap perubahan yang terjadi

pada variabel-variabel ekonomi makro akan berpengaruh besar- besaran pada Anggaran Belanja Daerah. Sebaliknya, setiap terjadi perubahan dalam kebijakan Anggaran Belanja Daerah (sebagai pencerminan kebijakan fiskal) yang diambil pemerintah pada gilirannya juga akan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Peranan kebijakan anggaran melalui kebijakan stimulasi fiskal, diharapkan akan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang tercermin dari peranannya dalam permintaan agregat. Adapun pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap perekonomian masyarakat antara lain: meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya (PDRB) dari tahun ke tahun. Menciptakan kesetabilan keuangan atau moneter negara, karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Belanja Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sejumlah asumsi yang untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan. Oleh karenanya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaiannya. Prioritas diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya untuk mencapai tingkat pencapaian pelayanan yang diinginkan dalam arah dan kebijakan umum APBD (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonomi dalam wilayah Provinsi Aceh di bentuk berdasarkan undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tanggal 21 juni 2001 dan peresmian di laksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Belanja Pemerintah Daerah Kota Langsa terus mengalami peningkatan

setiap tahun nya. Serta PDRB Kota Langsa juga mengalami peningkatan setiap tahun nya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di tabel I-2 berikut ini:

**Tabel 1-1**  
**Anggaran Belanja Pemerintah(Rp) dan Nilai PDRB Atas Harga Konstan**  
**(Rp) Kota Langsa Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Pemerintah (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>	<b>PDRB (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2013	576.541.156.990	-	28.511.232.217	-
2014	777.795.742.070	34.9	29.815.322.432	4.57
2015	795.095.693.423	22.2	31.078.210.832	4.23
2016	863.376.334.142	85.9	32.453.203.259	4.42
2017	1.055.502.972.648	22.25	33.913.845.539	4.50

Sumber: BPKD dan BPS Kota Langsa.

Berdasarkan tabel 1-1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun sejak 2013-2017 Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah terus mengalami peningkat, Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah tertinggi berada di tahun 2017 total Belanja Pemerintah Daerah yang direalisasikan adalah Rp. 1.055.502.972.648. Sedangkan Belanja Pemerintah Daerah terendah pada tahun 2013 dengan jumlah Rp. 576.541.156.990. Jika dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2016 Belanja Pemerintah Daerah mengalami peningkatan sangat pesat yaitu 85.9%. Sedangkan perkembangan yang mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2015 yaitu 22.2%. Disisi lain tingkat PDRB Kota Langsa juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya di tahun 2013 total PDRB adalah 29.815.322.432 dan di tahun 2017 total PDRB adalah Rp. 33.913.845.539. Jika dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2017 juga tingkat PDRB mengalami peningkatan sangat pesat yaitu 4.50 %. Sedangkan perkembangan yang mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2015 yaitu 4.23%. Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap

nilai PDRB di Kota Langsa, semakin meningkat nya nilai Belanja Pemerintah Daerah semakin tinggi pula nilai PDRB di Kota Langsa.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Perekonomian di Kota Langsa.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah Belanja Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Perekonomian di Kota Langsa.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Langsa.\

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Langsa mengenai Belanja Pemerintah Daerah.

2. Penelitian ini bermanfaat penelitian dalam memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan mengenai pemerintahan khususnya keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi yang akan melakukan penelitian yang sama.